

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan wajib membuat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut. Pemerintah mengakomodir hal tersebut melalui penerbitan beberapa peraturan kebijakan berupa Surat Edaran dan Peraturan Menteri. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dirumuskan judul “Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Kebijakan Yang Mengatur Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan”. Dua pokok permasalahan: bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan kebijakan tersebut di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman; dan apakah hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan kebijakan tersebut di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, pelaksanaan peraturan kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, konsisten dan berkelanjutan. kedua, hambatan yang ditemukan di dalam pelaksanaan diantaranya permasalahan niat dan keinginan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera mengurus dokumen lingkungan hidup, minimnya Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian dokumen lingkungan, belum terpenuhinya inventarisasi data yang baik dari Organisasi Perangkat Daerah teknis pembina usaha dan/atau kegiatan dan adanya unsur politis.

Kata Kunci : Peraturan Kebijakan, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan

ABSTRACT

Based on Law Number 32 of 2009 that concerning Environmental Protection and Management, every business and activity that has a business license or activity must have an environmental document and must make an Environmental Evaluation Document or Environmental Monitoring Document no longest than 2 (two) years since the enactment of the Act. The government accommodates this through several policy regulations in the form of Circular Letter and Ministerial Regulations. In this regard then the title is formulated "Implementation of Policy Regulation which Governs Businesses and/or Activities that have Business Permits and/or Activities that not having Environmental Documents and Environmental Permits", with two main issues of how implementation of these Policy Regulations in Yogyakarta and Sleman Regency and whether the resistance that found in the implementation of Policy Regulation in Yogyakarta and Sleman Regency. This research uses an empirical normative problem. Normative legal research is an approach based on primary legal material, examining theoretical matters concerning legal principles, legal conceptions, views and legal doctrines, regulations and legal systems. Empirical legal research is carried out by examining directly the research locations, namely the Yogyakarta and Sleman Regency Environmental Office. The research concludes the first is that the implementation of policy regulation well implemented, consistency and sustainability. Second, the resistance that found in the implementation are problem of intention and desire of the person in charge of the business and/or activity to manage immediately environmental documents, lack of the Human Resources who supervise and assessment environmental documents, have not fulfilled a good data inventory from the Organization of Area Peripheral technical business builder and/or activity and the political factor.

Keywords : Policy Regulation, Enviromental Evaluation Document, Environmental Monitoring Document, Environmental Permit